



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2017**

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wata'ala* atas berkah dan karunianya sehingga telah dapat disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman. Sesuai dengan fungsinya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bisa digunakan untuk mengukur kinerja. Sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini hanya melaporkan apa yang telah dikerjakan atau telah dihasilkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan menggambarkan secara kualitatif keberhasilan dari instansi, dimana ukuran keberhasilannya tidak hanya dilihat dalam konteks kedalam (instansi) tetapi dalam konteks keluar (berupa manfaat dan nilai tambah). Sehingga diharapkan sasaran yang selama ini dijadikan acuan oleh instansi dapat tercapai, karena secara empiris sasaran yang telah ditetapkan tersebut sebagian besar merupakan impact (apa yang ingin diubah/nilai tambah) dari penyelenggaraan kesektoran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi Bapelitbangda. Di samping itu, juga terdapat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara/daerah yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini selain dapat memberikan manfaat sebagai media informasi sekaligus dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan dengan harapan adanya koreksi dan masukan yang bermanfaat dari seluruh stakeholder guna penyempurnaan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Parit Malintang, Maret 2018
**KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Ir. H. ALI AMRAN, MP

Pembina Utama Muda, NIP. 19620619 199103 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum	5
B. Permasalahan Utama yang Dihadapi	10
C. Sistematika Pelaporan	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bapelitbangda Tahun 2017	14
C. Perjanjian Kinerja	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja	16
B. Analisis Capaian Kinerja	49
C. Realisasi Anggaran	
BAB IV. PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
4.2. Langkah ke Depan	53



DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel I.2.	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	9
Tabel I.3.	Daftar Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan	9
Tabel 2.1.	Misi, Tujuan, dan Sasaran Bapelitbangda	14
Tabel 2.2.	Rencana Kinerja Bapelitbangda Tahun 2017	15
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Pengukuran Capaian Kinerja	15
Tabel 3.2.	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Bapelitbangda Tahun 2017	16
Tabel 3.3.	Realisasi Pencapaian indikator Kinerja Sasaran 1 Bapelitbangda Tahun 2017	19
Tabel 3.4.	Kesesuaian Indikator RPJMD dengan RKPD 2017	19
Tabel 3.5.	Kesesuaian Indikator RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	33
Tabel 3.6.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017	34
Tabel 3.7.	Sinkronisasi Pagu Indikatif PPAS dengan Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017	35
Tabel 3.8.	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Bapelitbangda Tahun 2017	36
Tabel 3.9	Hasil Penjaringan Usulan Musrenbang RKPD Tahun 2017	37
Tabel 3.10.	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Bapelitbangda Tahun 2017	39
Tabel 3.11	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017	40
Tabel 3.12.	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Bapelitbangda Tahun 2017	46
Tabel 3.13	Daftar Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2017	47
Tabel 3.14.	Realisasi Keuangan Program / Kegiatan Bapelitbangda Tahun 2017	49



BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu perumusan kebijakan teknis dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana, dan Statistik Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, maka setiap daerah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah dengan memperhatikan prinsip-prinsip yaitu lingkup pertanggungjawaban, prinsip prioritas dan prinsip manfaat.

Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya.

A. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 67 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah dari 26 Perangkat Daerah lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki tugas pokok sebagai koordinator perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah ikut mempunyai peranan dalam mewujudkan komitmen tersebut diatas.

Tugas Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah melaksanakan tugas membantu Bupati pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang



Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dari segi kuantitas terdiri dari 33 orang aparatur dengan rincian :

1. Pimpinan Bapelitbangda, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bapelitbangda
2. Sekretariat Bapelitbangda, yang dijalankan oleh seorang Sekretaris, dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 Kepala Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ekonomi, dipimpin seorang Kepala Bidang, yang dibantu oleh 3 Kasubid, yaitu :
 - a. Sub Bidang PERIKANAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
 - b. Sub Bidang PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 - c. Sub Bidang PENENAMAN MODAL, INDUSTRI, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4. Bidang Sosial dan Budaya oleh seorang Kepala Bidang, yang dibantu oleh 3 Kepala Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 - b. Sub Bidang KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - c. Sub Bidang PEMERINTAHAN
5. Bidang Fisik dan Prasarana, dipimpin seorang Kepala Bidang, yang dibantu oleh 3 Kasubid, yaitu :
 - a. Sub Bidang PENATAAN RUANG DAN SARANA PRASARANA WILAYAH
 - b. Sub Bidang LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 - c. Sub Bidang PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PENANGGULANGAN BENCANA
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, dipimpin seorang Kepala Bidang, yang dibantu oleh 3 Kasubid, yaitu :
 - a. Sub Bidang PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
 - b. Sub Bidang PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
 - c. Sub Bidang PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

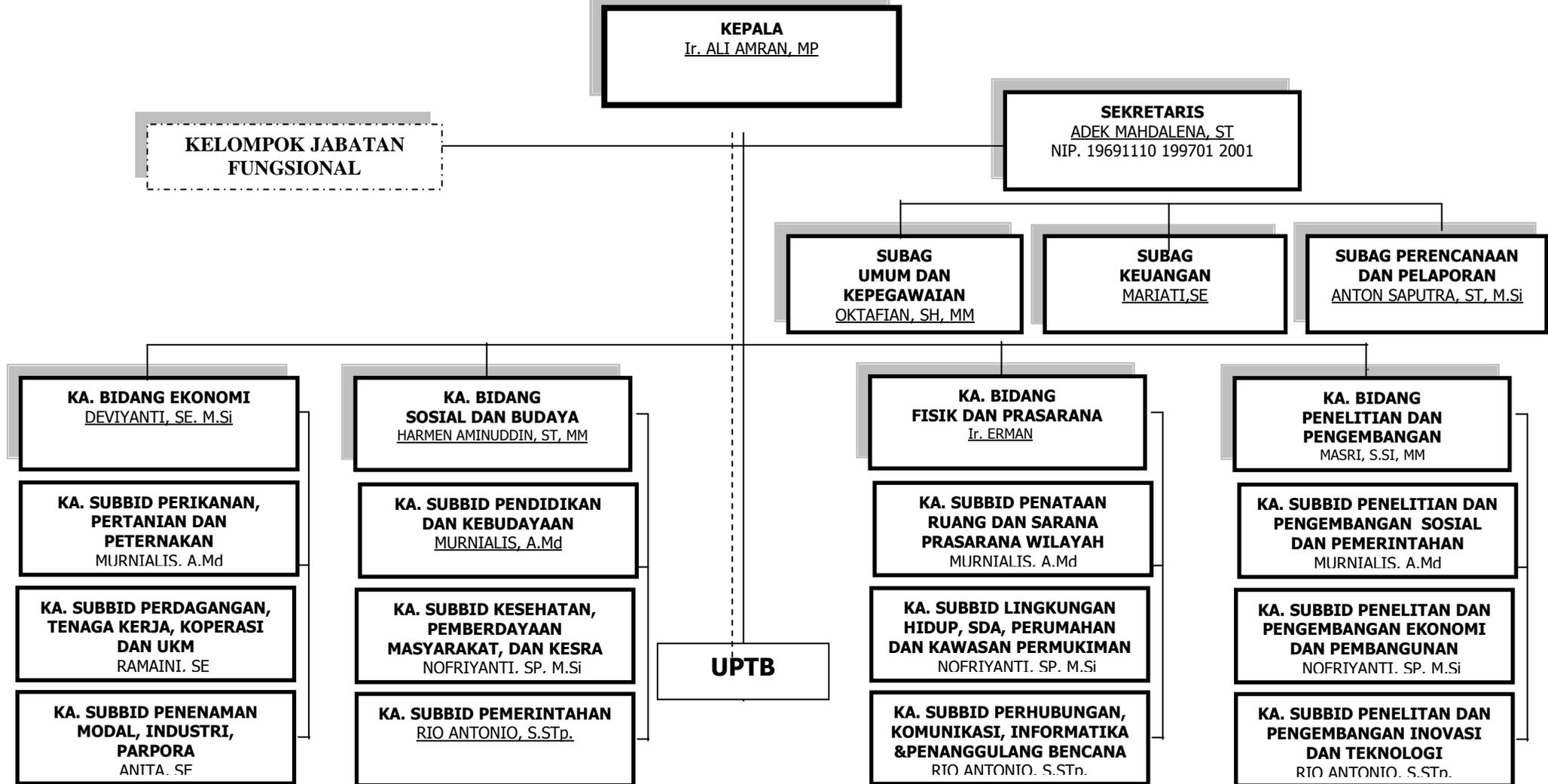


7. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Bapelitbangda, juga dibantu oleh unsur staf sebanyak 12 orang dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di bawah ini :



GAMBAR I.1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN





Pada tahun 2017, jumlah seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah 32 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi dari PNS yang ada, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

TABEL I.1
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	9 orang
2	Strata 1 (S-1)/ D-IV	20 orang
3	Sarjana Muda / D3	1 orang
4	SLTA	2 orang
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah	30 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bapelitbanda Tahun 2017

TABEL I.2
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	6 orang
2	III	25 orang
3	II	2 orang
4	I	-
	Jumlah	30 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bapelitbanda Tahun 2017

Diantara pejabat struktural yang ada, sudah ada eselon III dan eselon IV yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan . Sampai akhir tahun 2016, baru 8 orang pejabat struktural yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang mengikuti pelatihan dimaksud sesuai dengan tingkat eselonering yang diduduki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL I.3
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN PENJENJANGAN

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	Spamen/Diklatpim II	1 orang
2	Spama/ Ditklatpim III	3 orang
3	Adum/Diklatpim IV	8 orang
	Jumlah	10 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bapelitbanda Tahun 2017



B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan tupoksi perencanaan pembangunan daerah, Bapelitbangda masih memiliki permasalahan yang perlu menjadi perhatian sehingga berdampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya masih terdapat terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu

1. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan
2. Adanya ego sektoral antar instansi sehingga sinergisitas dalam pelaksanaan program belum maksimal.
3. Tuntutan dan aspirasi pemangku kepentingan yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan mendapatkan perhatian;
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat akibat rendahnya pemanfaatan hasil Musrenbang untuk perencanaan pembangunan daerah
5. Kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berubah secara cepat dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BAPELITBANGDA TAHUN 2017

C. PENETAPAN KINERJA BAPELITBANGDA TAHUN 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BAPELITBANGDA

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BAPELITBANGDA TAHUN 2017

Menyajikan capaian kinerja Bapelitbangda untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Bapelitbangda. Untuk setiap



pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

C. REALISASI ANGGARAN

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan di Bapelitbangda untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 melalui Renstra Bapelitbangda tahun 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Bapelitbangda tahun 2017 merupakan tahun kedua dari periode pelaksanaan Renstra Bapelitbangda tahun 2016-2021.

Untuk mencapai kinerja pada Bapelitbangda tahun 2017 maka Bapelitbangda menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2017 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda tahun 2017. Serta target-target kinerja untuk tahun 2017 yang telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dipenuhi oleh Bapelitbangda tahun 2017.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkasan mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda tahun 2017.

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena - fenomena yang ada, maka visi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada masa periode Renstra 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Bapelitbangda sebagai lembaga perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah daerah yang Sinergis, aspiratif, aplikatif, dan akuntabel.”**

Makna Visi tersebut memiliki 4 (empat) kunci pokok yakni :

1. Lembaga Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Sinergis

Agar hasil pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dituntut adanya proses perencanaan yang lebih bersinergis/ selaras dalam arti perencanaan yang dibuat selaras dengan tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD dan RPJPD, tujuan pembangunan propinsi dan nasional. Sehingga akan terjadi sinergisitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah

2. Lembaga Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Aspiratif

Perencanaan pembangunan aspiratif/partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya, salah satunya dengan menggali aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah tingkat nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional sehingga masyarakat bukan lagi objek melainkan juga sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan daerah benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Pendekatan perencanaan pembangunan daerah ini, diharapkan mampu



menjadikan Bapelitbangda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah yang lebih aspiratif/ partisipatif di tengah banyaknya tuntutan yang harus diperhatikan secara bersamaan.

3. Lembaga Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Aplikatif

Perencanaan sebagai salah satu aspek penting manajemen modern dituntut untuk bisa mengakomodasi kebijakan pusat sekaligus memenuhi kebutuhan di daerah, apalagi dewasa ini prinsip manajemen modern tidak hanya berdasarkan kepada *POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling)* melainkan juga bisa diterapkan dengan petunjuk penyusunan perencanaan dan proses pengelolaan perencanaan yang lebih terarah, lebih berorientasi hasil (berbasis kinerja).

Dengan berkaca kepada berbagai pengalaman aspek perencanaan pembangunan daerah periode sebelumnya, dimana masih banyaknya perencanaan daerah yang belum *link and match* secara penuh sesuai dengan kebutuhan, maka ke depannya harus ada perbaikan.

Dengan kata lain, kata aplikatif tersebut bermakna agar dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang dihasilkan, dapat ditindaklanjuti dan diterapkan/dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah dan/atau stakeholder lainnya sebagai acuan dan pedoman untuk merealisasikan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan betul-betul berorientasi hasil (kinerja) dan dapat memenuhi target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Lebih jauh dari itu, ke depan dengan adanya perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan pembangunan daerah akan lebih dapat disederhanakan dalam sebuah sistem yang terintegrasi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh *human error*.

4. Lembaga Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Akuntabel

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Jantung dari pemerintahan yang baik adalah kewajiban untuk bertanggungjawab atas berbagai kegiatan penyerenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi suatu pemerintahan, mampu secara signifikan mendapatkan dukungan dari publik terkait dengan kepercayaan masyarakat atas apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan untuk perencanaan pembangunan daerah.

Hal ini sangat sejalan dengan kata "Baru" yang tertuang dalam visi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, yang berarti adanya perubahan dari suatu perubahan wajah, ruang dan suasana Kabupaten Padang Pariaman, dan salah satu perubahan suasana yang dilakukan oleh Bapelitbangda adalah dalam bentuk pertanggungjawaban yang lebih transparansi dalam perencanaan.

Akuntabel yang akan dicapai oleh Bapelitbangda memang bukanlah hal mudah, karena diperlukan keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya, namun apabila ini dapat diwujudkan bukan tidak mungkin Bapelitbangda sebagai salah satu lembaga teknis daerah dapat turut membantu mewujudkan visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang diembannya.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi Bapelitbangda di atas, maka dirumuskan langkah-langkah lebih melalui 2 (dua) misi yaitu :

1. Mewujudkan Perencanaan, Penelitian Pengembangan Daerah Yang Sinergis, Aspiratif dan Aplikatif;
2. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang akuntabel

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2017

Tujuan dan sasaran strategis Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 2.1
MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAPELITBANGDA

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Perencanaan, Penelitian Pengembangan Daerah Yang Sinergis, Aspiratif dan Aplikatif	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Peringkat Pangripta Nusantara Tingkat Propinsi Sumbar	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD
		Nilai evaluasi AKIP Pemda pada Komponen Penilaian Perencanaan Kinerja oleh Kemenpan RB	Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang diakomodir	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap RKPD
		Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan Program Prioritas Kabupaten dengan Propinsi
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Daerah	Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang diakomodir	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang ditampung dalam dokumen perencanaan
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Daerah	Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase pencapaian IKU pemerintah daerah dengan kategori baik (> 90%)
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Daerah	Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang diakomodir	Persentase Hasil Kajian Kelitbang Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BAPELITBANGDA TAHUN 2017

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara umum dan pada Bapelitbangda khususnya, maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 yang menjadi



dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 termasuk untuk lingkup Bapelitbangda.

Dalam RKT Bapelitbangda Tahun 2017 mendukung 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) dari Bapelitbangda yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Bapelitbangda 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 2.2.
RENCANA KINERJA BAPELITBANGDA TAHUN 2017

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPDP terhadap RPJMD Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKPDP Persentase keselarasan Program Prioritas Kabupaten dengan Propinsi	93% 93% 97%
2.	Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang diakomodir	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang ditampung dalam dokumen perencanaan	22%
3.	Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase pencapaian target IKU pemerintah daerah (RPJMD) dengan kategori baik (> 90%)	90%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kajian Kelitbangdan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	50%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Bapelitbangda tahun 2017 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Bapelitbangda akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Bapelitbangda yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

Perjanjian kinerja Bapelitbangda Tahun 2017 secara rinci (eselon I, eselon III dan eselon IV) dapat dilihat pada lampiran 1 dari laporan ini

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Bapelitbangda selama tahun 2017. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Bapelitbangda tahun 2017 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja sasaran kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Evaluasi terhadap pencapaian komponen kegiatan ini digunakan rumus :

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk klasifikasi Penilaian terkait capaian kinerja indikator kinerja utama dilakukan penilaian seperti tabel berikut :

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Kategori
1	$\geq 100\%$	Sangat Baik
2	90% sd < 100%	Baik
3	80% sd < 90%	Cukup Baik
4	70% sd < 80%	Kurang Baik
5	0% sd < 70%	Gagal

Adapun capaian kinerja Bapelitbangda tahun 2017 dapat dilihat seperti tabel berikut ini :



**Tabel 3.2.
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Bapelitbangda Tahun 2017**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017			
					Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3			4			
1.	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Rata-rata dari Tingkat Keselarasan dari (Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Program Prioritas, Indikator Kinerja Program, pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD) x 100%	85,9%	93%	92,00%	98,92%	Baik
		Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD	Rata-rata dari seluruh OPD terhadap Tingkat Keselarasan dari (Program Prioritas, Indikator Kinerja Program, pada Renja OPD yang sesuai dengan RKPD) x 100%	92%	93%	90,80%	97,63%	Baik
		Persentase keselarasan Program Prioritas Kabupaten dengan Propinsi	Jumlah Program Prioritas Propinsi yang ikut didukung oleh Pemkab Pd. Pariaman tahun n dibagi jumlah total Program Prioritas Propinsi tahun n x 100%	95%	97%	100%	103,09%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang diakomodir	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang ditampung dalam dokumen perencanaan	Jumlah usulan masyarakat yang ditampung dalam RKPD dibagi jumlah usulan masyarakat yang disepakati dalam musrenbang Tk. kabupaten	9,3%	22%	20,13%	91,50%	Baik
3.	Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase pencapaian IKU pemerintah daerah dengan kategori baik (> 90%)	Jumlah Target IKU RPJMD yang persentase capaiannya > 90 % dibagi total jumlah IKU Pemda	88,23%	90%	88,23%	98,03%	Baik

**BAPELITBANGDA KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017			
					Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3			4			
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	Jumlah dokumen kelitbangan yang dipakai sebagai dasar kebijakan pembangunan/ jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan x 100%	25%	50%	60%	120%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil capaian kinerja terhadap 6 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa capaian **2 indikator** dikategorikan "**Sangat Baik**", **4 indikator** dikategorikan "**Baik**".

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA



Sasaran 1:

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah

Untuk meningkatkan sinergitas/ kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa 3 indikator kinerja utama sebagai acuan penilaian dengan capaian kinerja dari sasaran ini seperti berikut :

Tabel 3.3.
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Bapelitbangda Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	85,9%	93%	92,00%	98,92%	Baik
2.	Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD	92%	93%	90,80%	97,63%	Baik
3.	Persentase keselarasan Program Prioritas Kabupaten dengan Propinsi	95%	97%	100%	103.09%	Sangat Baik

Berikut ini dijelaskan analisis dan evaluasi kinerja masing-masing indikator kinerja pada sasaran 1.

Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD



Untuk mengukur persentase keselarasan RKPD tahun 2017 dengan RPJMD 2016-2021 dilakukan evaluasi terhadap beberapa item pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Kesesuaian Indikator RPJMD dengan RKPD 2017

No	Uraian	RPJMD (Tahun kedua)	RKPD 2017	% Kesesuaian
1	2	3	4	5
1	Tujuan	24	24	100%
2	Sasaran	39	39	100%
3	Indikator Kinerja Sasaran	64	64	100%



No	Uraian	RPJMD (Tahun kedua)	RKPD 2017	% Kesesuaian
1	2	3	4	5
4	Program Prioritas	150	150	100%
5	Indikator Kinerja Program	255	152	60%
	Total			460%
	% Rata-rata Kesesuaian			92,00%

Pada tahun 2017 realisasi persentase keselarasan/kesesuaian RKPD Tahun 2017 dengan RPJMD 2016-2021 dari rata-rata item yang dievaluasi mencapai tingkat persentase keselarasan sebesar : 92,00% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 93%. Capaian indikator kinerja pada sasaran 1 (Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD) tahun 2017 dapat dikategorikan **pencapaian baik** dengan tingkat persentase capaian sebesar 98,92% (92,00% dari target sebesar 93% yang telah ditetapkan).

Berdasarkan perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 untuk indikator keselarasan RPJMD dengan RKPD diperoleh hasil terjadi peningkatan realisasi dari 85,9% pada tahun 2016 menjadi 92,00% pada tahun 2017. Tidak tercapainya pencapaian target indikator pada tahun 2017 ikut dipengaruhi oleh Tidak semua program yang terdapat dalam RPJMD diusulkan dalam RKPD Tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya beberapa program yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun 2017. Untuk itu agar tahun mendatangnya dapat lebih ditingkatkan maka usulan RKPD yang disusun agar lebih memperhatikan/ mempedomani target/ sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada periode tahun berjalan.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini:

1. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan 5 kegiatan sebagai berikut :
 - a. **Revisi RPJMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2016-2021**
Kegiatan Revisi RPJMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2016-2021 ini mencakup :
 1. Dengan keluarnya PP 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor :050/4936/SJ dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / kepala Bappenas Nomor : 0430/M.PPN/12/2016 tentang petunjuk pelaksanaan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 maka dilakukan penyesuaian kembali RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan sebelum PP 18 2016 ini keluar.
 2. Penyesuaian yang dilakukan adalah terkait urusan kewenangan yang disesuaikan dengan perangkat daerah serta penyelarasan RPJMD dengan RPJMN serta penyesuaian beberapa indikator kinerja daerah yang masih belum bersifat outcome (indikator kinerja)
 3. Hasil yang dicapai adalah :

- Adanya nota kesepakatan bersama antara Pemerintah daerah dengan DPRD Nomor : 12/KEP.D/DPRD-2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang perubahan kebijakan umum dan program prioritas pembangunan daerah RPJMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2016-2021



- Tersusunnya dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang telah diselaraskan dan telah disampaikan ke DPRD untuk menjadi Ranperda
- Namun sampai akhir tahun 2017 rancangan Perda Perubahan RPJMD 2016-2021 sampai akhir tahun 2017 belum disepakati oleh legislatif menjadi Perda. Sampai akhir tahun 2017 masih dilaksanakan tahapan pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Sesuai agenda yang dibuat DPRD, penetapan rancangan perubahan Perda terkait perubahan RPJMD 2016-2021 akan dilaksanakan pada masa persidangan I DPRD pada awal tahun 2018.

b. **Penyusunan Rancangan RKPD**

Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD ini mencakup :

1. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan melalui pendekatan politis, teknokratik, demokratis, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang dapat memenuhi program/ janji Bupati terpilih, sesuai dengan syarat teknis perencanaan serta memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya.
2. Pendekatan bottom-up dilakukan melalui Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Nagari, kecamatan sampai tingkat Kabupaten, hal ini untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Pendekatan top-down diperlukan untuk memberikan arahan dan panduan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
4. Tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan rancangan RKPD adalah :
 - Penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2018 dan Renja OPD Tahun 2018
 - Orientasi penyusunan RKPD/ Renja OPD
 - Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD
 - Forum OPD
 - Musrenbang RKPD
 - Penyampaian rancangan awal Renja OPD

- Penyempurnaan rancangan RKPD
- Penyusunan Rancangan akhir RKPD
- Penetapan RKPD Tahun 2019
- Penyampaian RKPD ke Propinsi



5. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2017 dan disampaikan kepada Pemerintah Propinsi Sumbar pada tanggal 2 Juni 2017
6. Dokumen RKPD Tahun 2018 yang telah ditetapkan pada 31 Mei 2017 akan menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS 2018.

c. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan

Kegiatan Penyusunan Perubahan KUA Dan PPAS Perubahan ini mencakup :

1. Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2017 untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD TA 2017
2. Tahapan yang dilakukan adalah :
 - Melakukan Pembahasan terhadap usulan rancangan Perubahan Anggaran yang diusulkan oleh masing-masing OPD
 - Penyusunan Rancangan KUPA dan rancangan PPAS Perubahan
 - Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah
 - Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan



3. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 dan telah disepakati bersama antar DPRD dengan Bupati melalui
 - Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 8/Kep/BPP/2017 dan Nomor 22/Kep.D/DPRD-2017 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun anggaran 2017 tanggal 15 September 2017
 - Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 9/Kep/BPP/2017 dan Nomor 23/Kep.D/DPRD-2017 tentang PPAS Perubahan APBD Tahun anggaran 2017 tanggal 15 September 2017

D. Penyusunan KUA dan PPAS

Kegiatan Penyusunan KUA PPAS ini mencakup :

1. Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2018
2. Tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah
 - Melakukan pembahasan terhadap usulan rancangan Renja OPD yang diusulkan oleh masing-masing OPD
 - Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah
 - Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD
 - Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS



3. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 dan telah disepakati bersama antar DPRD dengan Bupati melalui :
 - Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 6/Kep/BPP/2017 dan Nomor 20/Kep.D/DPRD-2017 tentang Kebijakan Umum APBD Kab. Padang Pariaman Tahun anggaran 2018 tanggal 15 September 2017
 - Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 7/Kep/BPP/2017 dan Nomor

221/Kep.D/DPRD-2017 tentang PPAS APBD Kab. Padang Pariaman Tahun anggaran 2018 tanggal 15 September 2017.

E. Fasilitasi Penyusunan RPJM Nagari

Kegiatan Penyusunan RPJM Nagari ini mencakup :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari
 - Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten
 - Pengkajian Keadaan Nagari
 - Penyusunan rencana pembangunan nagari melalui musyawarah nagari
 - Penyusunan rancangan RPJM Nagari
 - Penyusunan rencana pembangunan nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari
 - Penetapan RPJM Nagari



2. Hasil dari Kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen RPJM Nagari sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 114 th 2014 di setiap Nagari di Kab. Padang Pariaman.

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan :

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi ini mencakup :

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait Bidang Ekonomi, baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten melalui rapat-rapat koordinasi baik secara resmi maupun tidak resmi
2. Menghimpun data terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh OPD lingkup bidang ekonomi berikut dengan sumber pendanaannya.
3. Melakukan monitoring secara langsung dan tidak langsung tentang pelaksanaan program/kegiatan oleh OPD terkait Bidang Ekonomi dan Lembaga lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Melakukan peninjauan lapangan terkait rencana/usulan program dan kegiatan baik yang sedang dilaksanakan maupun yang akan diusulkan untuk tahun berikutnya

5. Melalui rapat koordinasi dapat diketahui potensi sumberdaya yang akan dikembangkan dan berbagai permasalahan yang perlu diatasi, sehingga program dan kegiatan pembangunan dapat dicapai secara maksimal
6. Dapat dijadikan sebagai salah satu informasi dan bahan acuan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan berikutnya oleh pengambil kebijakan
7. Hasil pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi antara lain :
 - koordinasi dengan kementerian Perindustrian RI tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (Master Plan) Kawasan Industri Padang Pariaman dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (Master Plan) Kawasan Industri Padang Pariaman
 - koordinasi dengan pemerintah propinsi Sumatera Barat terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk tahun 2017-2037, sub zona wisata alam/pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil pada zona Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Pariwisata (KPU-W-P3K) di Kabupaten Padang Pariaman, Penyusunan Master Plan dan DED Pariwisata, kegiatan Penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) Agribisnis dan Agroindustri Propinsi Sumbar, Penyusunan RPIP Sumbar, Kajian Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Kabupaten Padang Pariaman
 - Rapat Koordinasi kepada OPD terkait Bidang Ekonomi di tingkat Kabupaten dalam hal penyusunan perencanaan seperti ; penyusunan Renja, RKA termasuk monitoring pelaksanaan kegiatan SKPD lingkup Bidang Ekonomi di lapangan.
 - Rapat Koordinasi dengan OPD lingkup Bidang Ekonomi di tingkat Provinsi mengenai sinkronisasi kegiatan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD lingkup Bidang Ekonomi Provinsi yang dialokasikan di Kabupaten Padang Pariaman.
 - Mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan OPD terkait bidang ekonomi se Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi sekaligus mengikuti rapat-rapat koordinasi di tingkat provinsi maupun pusat.



b. **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ini mencakup :

1. Pelaksanaan rapat-rapat monev terkait penyusunan renja perangkat daerah di bidang ekonomi dan kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan daerah, RPJMD
2. Pemantauan pelaksanaan program kegiatan OPD di bidang ekonomi , untuk melihat pelaksanaan hasil kegiatan dan pencapaian target kinerja yang ditetapkan



c. **Fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah**

Kegiatan forum pengembangan ekonomi daerah ini mencakup :

1. Memfasilitasi pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
2. Mengadakan Workshop Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2017
3. Untuk penyamaan Persepsi dan memberikan Pemahaman terhadap Pengembangan Ekonomi Daerah dalam hal ini terhadap produk unggulan Daerah Yaitu Komoditi Kakao dan Kelapa.
4. Meminta saran dan masukan dari peserta Whorkshop Pengembangan Ekonomi daerah untuk mengetahui Permasalahan utama dalam Pengembangan Komuditi terutama Komuditi kakao dan Kelapa serta mencarikan Solusinya, sehingga bisa menjadi Referensi bagi pengambil Keputusan untuk membuat kebijakan dalam Pengembangan Ekonomi daerah .
5. Kedepannya diharapkan mampu membuat Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman.
6. Mengevaluasi Hasil dari workhshop Pengembangan Ekonomi Daerah nantinya bisa dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan/ Keputusan dan kemudian untuk perencanaan untuk masa yang akan datang
7. Hasil pelaksanaan :
 - Terbentuknya Tim Pengembangan Ekonomi daerah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.
 - Terlaksananya Workshop Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017.
 - Terlaksananya rapat Evaluasi dengan SKPD terkait, Masyarakat dan Nagari se Kabupaten Padang Pariaman.

- Melakukan Studi Komparatif tentang Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) guna meningkatkan pemahaman dan pengembangan serta sebagai referensi dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Aksi dari FPED.
- Tujuan dari Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) adalah memperbaiki sistem pengembangan Ekonomi Daerah khususnya UMKM secara terintegrasi dan berkesinambungan, dengan strategi pendekatan yang dilakukan adalah dengan :
 - Pemberdayaan Kelompok-Kelompok Tani, Gapoktan, KWT dan Kelompok lainnya yang ada di Nagari.
 - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Nagari
 - Inovasi Teknologi sesuai kebutuhan UKM dan perluasan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran.
 - Pengembangan Potensi-Potensi Ekonomi Daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan mengadakan Pembinaan, pembinaan oleh Instansi terkait kepada Kelompok-kelompok tani dan gapoktan dan KWT
 - Target pencapaian dari Worskhop Pengembangan Ekonomi Daerah adalah :
 - Berkembangnya Produk Unggulan Daerah kabupaten Padang Pariaman yaitu Kakao dan Kelapa.
 - Terbinanya Kelompok-kelompok tani, Gapoktan dan KWT di Nagari-Nagari. Untuk Program dan Kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
 - Tersedianya laporan Kegiatan fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi daerah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017



3. **Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah & Besar**, dengan kegiatan :

a. **Perencanaan Air Minum Drainase & Sanitasi Perkotaan**

Kegiatan Perencanaan Air Minum Drainase & Sanitasi Perkotaan ini mencakup :

1. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target Universal Access (100-0-100)

(sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

2. Hasil kegiatan yang dilaksanakan :

- Sosialisasi kegiatan Pamsimas III .
- Monitoring dan evaluasi kegiatan Pamsimas dengan hasil : Terinventarisirnya permasalahan kegiatan Pamsimas III, Lahirnya short list kegiatan Pamsimas tahun 2018 sumber dananya APBN dan APBD Kabupaten, Terlaksanakannya kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum , Drainase dan Sanitasi Perkotaan
- Ekpose Kegiatan Pamsimas



4. **Program Perencanaan Sosial dan Budaya**, dengan kegiatan :

a. **Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya**

Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya ini mencakup :

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait Bidang Sosial Budaya, baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten melalui rapat-rapat koordinasi baik secara resmi maupun tidak resmi
2. Menghimpun data terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh OPD lingkup bidang sosial budaya berikut dengan sumber pendanaannya.
3. Melakukan monitoring secara langsung dan tidak langsung tentang pelaksanaan program/kegiatan oleh OPD terkait Bidang sosial Budaya dan Lembaga lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman



b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ini mencakup :

1. Pelaksanaan rapat-rapat monev terkait penyusunan renja perangkat daerah di bidang sosial budaya dan kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan daerah, RPJMD.
2. Pemantauan pelaksanaan program kegiatan OPD di bidang sosial budaya , untuk melihat pelaksanaan hasil kegiatan dan pencapaian target kinerja yang ditetapkan

**c. Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat**

Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya ini mencakup :

1. Kegiatan pelaksanaan Kabupaten Sehat dilaksanakan di 11 Kecamatan Sehat. Lokasi kegiatan di 11 Kecamatan Sehat sebagaimana disahkan melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 287/KEP/BPP/2016 tentang Penetapan Lokasi dan Kawasan Sehat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016. Diantara 11 kecamatan sehat tersebut adalah Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Lubuk Alung, IV Koto Aur Malintang, V Koto Kampung Dalam, Sungai Limau, 2x11 Kayu Tanam, Batang Anai, Sungai Geringging dan Kecamatan Nan Sabaris
2. Hasil yang dicapai :
 - Optimalnya peran Tim Teknis dan Tim Pembina Kabupaten Sehat yang disahkan melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 241/KEP/BPP/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Kabupaten Sehat Tahun 2017
 - Optimalnya kelembagaan dalam penyelenggaraan kabupaten sehat : Kelembagaan di tingkat Kabupaten yaitu Forum Kabupaten Sehat, sesuai Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 354/KEP/BPP/2017 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2020, Kelembagaan di tingkat Kecamatan yaitu Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, Kelembagaan di Tingkat Nagari yaitu Pokja (Kelompok Kerja) Nagari Sehat

- Telah tersedianya Sekretariat Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Padang Pariaman
- Terlaksananya Program Kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum yang disepakati masyarakat.
- Telah terlaksananya beberapa kali rapat koordinasi dengan SKPD terkait, lokakarya serta konsultasi publik tentang penyelenggaraan kabupaten sehat dan pentingnya peranan kelembagaan dalam kabupaten sehat.
- Telah dilakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan forum komunikasi kecamatan sehat oleh Forum Kabupaten Padang Pariaman Sehat dan Tim Teknis Kabupaten Padang Pariaman Sehat di 11 Kecamatan Sehat Kabupaten Padang Pariaman. 11 Kecamatan sehat ini telah disahkan melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 287/ KEP/BPP/2016 Tanggal 20 Juni 2016 tentang Penetapan Lokasi dan Kawasan Sehat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016. Pada lampiran Keputusan Bupati Padang Pariaman ini juga ditetapkan 3 (tiga) Tatanan Kabupaten Sehat yaitu Kawasan Pariwisata Sehat, Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat dan Kehidupan Masyarakat Yang Sehat dan Mandiri.
- Telah dilakukan beberapa kali sharing informasi dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat (salah satunya Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh) yang mendapat berbagai tingkat penghargaan dalam pelaksanaan kabupaten/kota sehat yaitu penghargaan padapa, wiwerda dan wistara.
- Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil mendapatkan penghargaan Swasti Saba Padapa pada Tahun 2015 yang lalu dan akan mengikuti penilaian Tahap Wiwerda Pada Tahun 2017.
- Telah disusun 6 buah dokumen terkait penyelenggaraan kabupaten sehat Tahun 2017 : Dokumen Profil Kabupaten Sehat Kabupaten Padang Pariaman, Dokumen Profil Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Padang Pariaman, Dokumen Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat, Dokumen Tatanan Kawasan Sarana, Prasarana Kawasan Permukiman Yang Sehat dan Dokumen Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri



5. **Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dengan kegiatan :**

a. **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ini mencakup :

1. Lokasi pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan adalah di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan Bidang Fisik Prasarana antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Pelaksanaan rapat-rapat monev terkait penyusunan renja perangkat daerah di bidang fisik dan prasarana dan kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan daerah, RPJMD.
3. Pemantauan pelaksanaan program kegiatan OPD di bidang fisik dan prasarana, untuk melihat pelaksanaan hasil kegiatan dan pencapaian target kinerja yang ditetapkan



b. **Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana**

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana ini mencakup :

1. Hasil kegiatan yang dilaksanakan :
 - Terlaksananya Rapat koordinasi perencanaan bidang fisik prasarana dengan

Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

- Terlaksananya Rapat Evaluasi Bidang fisik prasarana di Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- Mengikuti Sosialisasi Bidang Fisik dan Prasarana di Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 2018 – 2022



6. **Program Perencanaan Tata Ruang**, dengan kegiatan :

a. **Koordinasi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang**

Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang ini mencakup :

1. Lokasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang adalah di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun SKPD yang terkait langsung antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
2. Hasil yang dicapai :
 - Terselenggaranya rapat rutin BKPRD.
 - Terdampingi, termonitoring dan terevaluasinya kegiatan revisi RTRW.
 - Teroverlaynya rencana lokasi usaha/pembangunan terhadap peta pola ruang RTRW.
 - Terlaksanakannya kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang



**Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD**

Untuk mengukur persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD pada Tahun 2017 dilakukan evaluasi terhadap beberapa item pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.5.**Kesesuaian Indikator RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017**

No	Uraian	RKPD 2017	Renja 2017	% Kesesuaian
1	2	3	4	5
1	Program Prioritas	152	152	100%
2	Indikator Kinerja Program	152	124	81,58%
	Total			181,58%
	Rata-rata			90,80%

Pada tahun 2017 realisasi tingkat keselarasan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 terhadap RKPD Tahun 2017 dari rata-rata item yang dinilai mencapai tingkat keselarasan sebesar : 90,80% dari target yang ditetapkan sebesar 93%. Capaian indikator kinerja pada sasaran 1 (Tingkat keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD) tahun 2017 dapat dikategorikan **pencapaian baik** dengan tingkat persentase capaian sebesar 97,63% (90,80% dari target sebesar 93% yang telah ditetapkan).

Berdasarkan perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 untuk indikator Tingkat keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD diperoleh hasil terjadi penurunan realisasi dari 92% pada tahun 2016 menjadi 90,80% pada tahun 2017. Tidak tercapainya pencapaian target indikator pada tahun 2017 ikut dipengaruhi oleh :Tidak semua program yang diusulkan OPD dalam Renja mengisi target indikator kinerja program. Masih terdapat progrma yang tidak punya/ belum diisi target indikator kinerja programnya. Dari 152 program yaang terisi lengkap indikator kinerja programnya baru sebanyak 124

program. Solusi kedepannya : Akan dilakukan pengawasan dan mengingatkan kembali setiap OPD dalam mengisi matrik renjanya agar indikator kinerja programnya diisi dengan lengkap, sehingga bisa dievaluasi.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini:
(Penjelasannya sama dengan penjabaran pada program yang mendukung indikator kinerja sasaran sebelumnya yang tersebut diatas)

Persentase keselarasan Program Prioritas Kabupaten dengan Propinsi



Untuk mengukur persentase keselarasan Program Prioritas Kabupaten dengan Propinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 dilakukan evaluasi terhadap beberapa item pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017

No	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017
1	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat	Peningkatan pengamalan kehidupan beragama dan berbudaya (2)
2	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (7)
3	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi (1)
4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi (1)
5	Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Peningkatan pembangunan pertanian dan perikanan berbasis kawasan dan komoditi unggulan (5)
6	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi	Peningkatan iklim investasi dan usaha serta pengembangan pariwisata daerah secara terpadu (6)
7	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Peningkatan pembangunan pertanian dan perikanan berbasis kawasan dan komoditi unggulan (5) Peningkatan pembangunan ekonomi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi (4)
8	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan	Penurunan tingkat kemiskinan secara



No	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017
	Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	terintegrasi (9)
9	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi berwawasan lingkungan (3)
10	Pelestrarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana alam	Peningkatan pembangunan berbasis mitigasi bencana (8)

Tabel 3.7.
Sinkronisasi Pagu Indikatif PPAS dengan Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROV. SUMBAR TAHUN 2017	PAGU INDIKATIF					
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	HIBAH/BAN SOS/ BAN TUAN KEUANG GAI LAINNYA	PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH PLAFON	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Menunjang Perekonomian dan Daya Saing Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pembangunan mental dan penganan agama dan abs-sbk dalam kehidupan masyarakat (1)	2,398,951,595	6,661,301,000	-	-	9,060,252,595	0.62%
2	Pelaksanaan reformasi dan birokrasi dalam pemerintahan (2)	92,296,775,999	71,530,579,996	9,837,059,029	-	173,664,415,025	11.87%
3	Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan (3)	465,526,855,435	28,815,726,797	-	-	494,342,582,232	33.79%
4	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (4)	61,345,322,293	97,936,854,810	-	-	159,282,177,103	10.89%
5	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis (5)	17,440,404,989	12,104,925,130	-	-	29,545,330,119	2.02%
6	Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, umkm dan peningkatan investasi (6)	12,055,635,620	309,364,487,257	-	16,800,000,000	338,220,122,877	23.12%
7	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan (7)	8,969,653,320	35,480,699,395	-	-	44,450,352,715	3.04%
8	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal (8)	11,426,703,831	11,772,061,886	169,695,926,012	-	192,894,691,729	13.19%
9	Pembangunan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur (9)	-	9,900,000,000	-	-	9,900,000,000	0.68%
10	Pembangunan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam (10)	2,152,531,803	9,461,760,778	-	-	11,614,292,581	0.79%
TOTAL		673,612,834,884	593,028,397,049	179,532,985,041	16,800,000,000	1,462,974,216,974	100%

Pada tahun 2017 realisasi persentase keselarasan Program Prioritas Kabupaten dengan Propinsi pada Tahun 2017 mencapai tingkat keselarasan sebesar : 100% dari target yang ditetapkan sebesar 93%. Dari 10 Program prioritas pada RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017 didukung oleh 9 program prioritas RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017.

Capaian indikator kinerja pada sasaran 1 (persentase keselarasan Program Prioritas Kabupaten dengan daerah Propinsi) tahun 2017 dapat dikategorikan **pencapaiannya sangat baik** dengan tingkat persentase capaian sebesar 103,09% (100% dari target sebesar 97% yang telah ditetapkan). Berdasarkan perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 untuk indikator persentase keselarasan Program Prioritas Kabupaten dengan

Propinsi diperoleh hasil terjadi kenaikan realisasi dari 95% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2017.

Dapat tercapainya pencapaian target indikator pada tahun 2017 ikut dipengaruhi oleh : Sudah dilaksanakannya sinergisitas program prioritas yang dilaksanakan antara propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan telah optimalnya koordinasi yang dilaksanakan

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini:
(penjelasannya sama dengan penjabaran pada program yang mendukung indikator kinerja sasaran sebelumnya yang tersebut diatas)

**Sasaran 2:****Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang diakomodir**

Untuk meningkatkan sinergisitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang lebih aspiratif khususnya untuk meningkatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang diakomodir telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa 1 indikator kinerja utama sebagai acuan penilaian dengan capaian kinerja dari sasaran ini seperti berikut :

Tabel 3.8.**Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Bapelitbangda Tahun 2017**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang ditampung dalam dokumen perencanaan	9,3%	22%	20,13%	91,50%	Baik

Berikut ini dijelaskan analisis dan evaluasi kinerja masing-masing indikator kinerja pada sasaran 2.

Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang ditampung dalam dokumen Perencanaan

Untuk mengukur persentase aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dilakukan penjaringan hasil usulan musrenbang, yang dimulai dengan tahapan dari musrenbang tingkat nagari dan dilakukan penyaringan di musrenbang tingkat kecamatan dan difinalkan dalam

musrenbang tingkat kabupaten. Hasil Penjaringan Usulan Musrenbang RKPD Tahun 2017 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Hasil Penjaringan Usulan Musrenbang RKPD Tahun 2017

Jumlah Usulan Musrenbang Tk. Nagari	Jumlah Usulan Musrenbang Tk. Kecamatan	Jumlah Usulan Musrenbang Tk. Kabupaten	Jumlah Usulan yang ditampung dalam Renja OPD	% Usulan yang ditampung
7.667	1.545	927	311	20,13%

Pada tahun 2017 jumlah usulan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang ditampung dalam Dokumen Perencanaan Tahun 2017 berjumlah sebanyak 311 usulan, sementara total usulan yang dijaring dalam musrenbang tingkat kecamatan sebanyak 1.545 usulan masyarakat. Sehingga Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 20,13%.

Capaian indikator kinerja pada sasaran 2 (Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan) tahun 2017 dapat dikategorikan **pencapaian baik** dengan persentase capaian sebesar 91,50% (20,13% dari target 22% yang telah ditetapkan).

Berdasarkan perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 untuk indikator Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan diperoleh hasil terjadi peningkatan realisasi dari 9,3% pada tahun 2016 menjadi 20,13% pada tahun 2017. Tidak tercapainya pencapaian target indikator pada tahun 2017 ikut dipengaruhi oleh :

- Masih banyaknya usulan masyarakat yang bisa dilimpahkan ke nagari (Dana Alokasi Nagari) dan bukan menjadi prioritas dan kewenangan kabupaten
- Adanya beberapa usulan masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang ternyata sudah terakomodir dalam APBD Tahun 2017, sehingga tidak perlu dianggarkan lagi.
- Keterbatasan alokasi anggaran APBD Kabupaten Padang Pariaman sehingga tidak semua kegiatan hasil musrenbang yang telah masuk dalam RKPD dapat ditampung oleh OPD teknis dalam penyusunan APBD

Solusi kedepannya :

- Melakukan pengontrolan ketat dari awal perencanaan sampai penyusunan APBD terkait usulan masyarakat melalui musrenbang mesti /sudah diakomodir dalam rancangan RKPD dan Renja OPD, KUA PPAS dan RAPBD
- Meningkatkan komitmen dan kerjasama dengan legislatif untuk dapat memprioritaskan proses perencanaan bottom up, tidak hanya proses perencanaan teknokratik dan politik saja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini:

1. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan kegiatan :

a. **Penyelenggaraan Musrenbang RKPD**

Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang ini mencakup:

1. Kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2017 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 dimulai dari :
 - Musrenbang Tk. Nagari yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari – 13 Februari 2017,
 - Musrenbang Tk. Kecamatan pada tanggal 8 – 23 Februari 2017.
 - Forum konsultasi Publik : 28 Februari 2017
 - forum OPD dilaksanakan pada tanggal 22 -23 Maret 2017
 - Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten yang diikuti oleh DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten, Forkopimda, camat dan walinagari dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya dilaksanakan pada tanggal 29 – 31 Maret 2017.
 - Musrenbang Tingkat Propinsi Sumbar

2. Hasil dari terlaksananya kegiatan ini adalah : Tersusunnya dokumen Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang telah dirangking/diprioritaskan dan disepakati bersama oleh stakeholders maupun pemangku kepentingan lainnya dengan jumlah output kegiatan satu dokumen Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang telah dirangking/diprioritaskan dan disepakati bersama oleh stakeholders maupun pemangku kepentingan lainnya.

Berikut dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan :





b. Penyusunan rancangan RKPD

Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD ini mencakup :

1. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan melalui pendekatan politis, teknokratik, demokratis, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang dapat memenuhi program/ janji Bupati terpilih, sesuai dengan syarat teknis perencanaan serta memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya.
2. Pendekatan bottom-up dilakukan melalui Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Nagari, kecamatan sampai tingkat Kabupaten, hal ini untuk menjangkau aspirasi masyarakat sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2017 dan disampaikan kepada Pemerintah Propinsi Sumbar pada tanggal 2 Juni 2017



Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah dapat terjaga dengan baik sesuai perencanaan telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa 1 indikator kinerja utama sebagai acuan penilaian dengan capaian kinerja dari sasaran ini seperti berikut :

Tabel 3.10.

Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Bapelitbangda Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase pencapaian IKU pemerintah daerah dengan kategori baik (> 90%)	88,23%	90%	88,23%	98,03%	Baik

Berikut ini dijelaskan analisis dan evaluasi kinerja indikator kinerja pada sasaran 3.

Persentase pencapaian IKU pemerintah daerah dengan kategori baik (> 90%)

Untuk mengukur persentase pencapaian IKU Pemerintah Daerah dengan kategori baik (>90%) dapat dilihat pada hasil pencapaian IKU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 seperti tabel berikut :

Tabel 3.11.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017

No.	IKU Kabupaten	Target 2017	Realisasi 2017	% Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Majelis Taklim yang aktif	75%	70%	93,33%
2	Peningkatan Produktivitas Pangan:			
	- Padi per hektar	5,23	5,26	100,57%
	- Jagung per hektar	8,30	8,54	102,89%
3	PDRB per Kapita	47,19	42,88	90,97%
4	Persentase Realisasi Investasi	40%	50,70%	126,75%
5	Angka Rata-rata lama sekolah	8,7	7,0	80,45%
6	Angka Melek Huruf	94	94,7	100,8%
7	Angka Harapan Hidup	69,66	67,80	97,32%
8	Persentase kunjungan wisata	14,58%	225,92	1549,51%
9	Rasio Luas ruang Terbuka hijau per satuan Luas Wilayah	0,58	0,94	106,82%
10	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	58%	49,66%	85,43%
11	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	92,74%	91,09%	98,22%



No.	IKU Kabupaten	Target 2017	Realisasi 2017	% Pencapaian
1	2	3	4	5
12	Tingkat pengangguran terbuka	7,76%	5,94%	123,45%
13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	B	B	100%
14	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	74,32	73,82	99,33%
16	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	13	13,86	93,38

Pada tahun 2017 realisasi persentase pencapaian IKU Pemerintah Daerah dengan kategori baik (>90%) dari 17 indikator kinerja terdapat sebanyak 15 indikator yang capaiannya diatas 90% atau persentase pencapaian IKU sebesar : 88,23% Capaian indikator kinerja pada sasaran 3 (persentase pencapaian IKU Pemerintah Daerah dengan kategori baik (>90%) tahun 2017 dapat dikategorikan **pencapaian baik** dengan tingkat persentase capaian sebesar 98,03% (88,23% dari target sebesar 90% yang telah ditetapkan). Berdasarkan perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 untuk indikator persentase pencapaian IKU Pemerintah Daerah dengan kategori baik (>90%) diperoleh hasil sama dengan realisasi sebesar 88,23% pada tahun 2016 dan tahun 2017.

Keberhasilan pencapaian target indikator pada tahun 2017 ikut dipengaruhi oleh :

- Evaluasi dan monitoring yang dilakukan cukup optimal dalam menggambarkan kondisi dan data informasi yang terukur dan akurat
- Program/ kegiatan yang dibuat telah cukup efektif dan berbasis kinerja sehingga dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini:

1. **Program Pengembangan Data/Informasi**, dengan kegiatan :

a. **Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan**

Kegiatan Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan ini mencakup :

1. Pelaksanaan kegiatan 1 tahun anggaran (12 bulan) Bulan Januari - Desember 2017
2. Hasil yang dicapai :
 - Terbentuknya Tim Pelaksana Pengumpulan, updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 yang disahkan melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 399/KEP/BPP-2017 Tanggal 12 Juli 2017.
 - Terlaksananya rapat koordinasi dengan mengundang seluruh OPD terkait serta mengumpulkan isian data yang telah diberikan.

- Terlaksananya pengentrian data pada Website SDP2D (Sistim Database Perencanaan Pembangunan Daerah) milik Propinsi Sumatera Barat

**b. Penyusunan Data Pokok Pembangunan Daerah**

Kegiatan Penyusunan Data Pokok Pembangunan Daerah ini mencakup :

1. Pembentukan tim penyusunan data pokok pemsngunan daerah
2. Penyusunan dokumen Buku Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

**2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :****a. Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan RPJMD**

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan RPJMD ini mencakup :

1. pelaksanaan kegiatan 1 tahun anggaran (12 bulan) Bulan Januari - Desember 2017
2. Hasil yang dicapai :
 - Terbentuknya Tim Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan RKPD.
 - Terlaksananya rapat koordinasi dengan mengundang seluruh OPD terkait serta mengumpulkan isian data yang telah diberikan.
 - Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017



b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan ini mencakup :

1. meliputi monitoring dan evaluasi pelaporan manajerial Dana Alokasi Khusus
2. Hasil yang dicapai :
 - Penyusunan Laporan triwulan dan laporan akhir tahun pelaksanaan DAK;
 - Penyusunan laporan pemetaan permasalahan dan evaluasi pelaksanaan DAK masing-masing bidang;
 - Pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi DAK dengan SKPD Pelaksana DAK masing-masing Bidang
 - Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi DAK.

**3. Program perencanaan sosial dan budaya, dengan kegiatan :****a. Pemantauan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Padang Pariaman**

Kegiatan Pemantauan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Padang Pariaman ini mencakup :

1. Pembentukan Tim Aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017
2. terlaksananya Rapat-rapat Tim Aksi PPK serta penajaman RAD PPK Pemda Tahun 2017



b. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahan Sosial di Daerah

Kegiatan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahan Sosial di Daerah ini mencakup :

1. Lokasi kegiatan adalah 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman
2. Hasil yang dicapai :
 - Terbentuknya Kepengurusan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2017 dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 242/KEP/BPP/2017 Tanggal 29 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017
 - Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi TKPKD sesuai Permendagri Nomor 42 Tahun 2015
 - Telah didapatnya Basis Data Terpadu (BDT) 2015 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diawali dengan proses pengisian form-form sehubungan dengan kebutuhan data untuk program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah dan Kegiatan ini dilanjutkan dengan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu 2015 dengan leading sektornya Dinsos PPPA.
 - Terlaksananya Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tentang Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penanganan Daerah Tertinggal di Sumatera Barat
 - Terinventarisirnya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang di danai APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 di Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



4. **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)**, dengan kegiatan :

a. WISM APL II dan Paralel Financial WISM

Kegiatan WISM APL II ini mencakup :

1. Ruang lingkup kegiatan Program WISMP 2 Kabupaten Padang Pariaman, berada pada Daerah Irigasi (DI) kesepakatan KPIU Bapelitbangda, Pengairan dan Pertanian
2. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Partisipatif dan Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis / (*Project Management And Technical Assistance*). Yang meliputi :
 - Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Pengolahan Data dan Informasi KPI
 - Pengadaan dan Operasional Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) / Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM)
 - Penguatan Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten
 - Penyusunan, Konsultasi Publik, Penetapan dan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penguatan KPI
 - Tersedianya tenaga pendamping masyarakat Program WISMP 2 dengan masa pendampingan 12 (dua belas) bulan untuk Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat dan 11 (sebelas) bulan untuk Tenaga Pendamping Masyarakat.
 - Terlaksananya pendampingan masyarakat petani pemakai air yang tergabung dalam wadah P3A/GP3A di Daerah Irigasi WISMP 2
 - Terbentuknya komisi irigasi yang baru.
 - Tersusunnya rencana kerja komisi irigasi Kabupaten Padang Pariaman



5. **Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**, dengan kegiatan :

a. Operasional Penunjang Kegiatan KOTAKU Kab. Padang Pariaman

Kegiatan Operasional Penunjang Kegiatan KOTAKU Kab. Padang Pariaman ini mencakup :

1. Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Kecamatan Lubuk Alung.
2. Pelaksanaan kegiatan adalah berupa pertemuan dengan warga, rapat koordinasi baik dengan Koordinator Kota, Assisten Kota Mandiri Community Development Perkotaan, KSM , Walinagari dan Walikorong beserta OPD yang melaksanakan program kemiskinan
3. Hasil yang dicapai :
 - Terbentuknya Kelompok Kerja Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 240/KEP/BPP/2017 tanggal 29 Mei 2017
 - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan nagari sasaran program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
 - Laporan setiap triwulan tentang pelaksanaan program KOTAKU di lapangan oleh Askot CD Mandiri Perkotaan
 - Telah dilakukan monitoring dan uji petik terhadap kegiatan dilapangan dalam rangka memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai target
 - Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)



Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan meningkatnya pemanfaatan Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Daerah telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa 1 indikator kinerja utama sebagai acuan penilaian dengan capaian kinerja dari sasaran ini seperti berikut :

Tabel 3.12.**Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Bapelitbangda Tahun 2016**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	25%	50%	60%	120%	Sangat Baik

Berikut ini dijelaskan analisis dan evaluasi kinerja indikator kinerja pada sasaran 3.

Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan

Dari tahun 2016 - 2017 Hasil Kajian Kelitbangan yang telah Dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan adalah sebanyak : 3 dokumen dari jumlah hasil kelitbangan yang telah dihasilkan sebanyak 5 Dokumen dengan tingkat persentase sebesar : 60%

Berikut dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang telah dihasilkan :

Tabel 3.13.**Daftar Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2017**

Tahun	Hasil Kajian dan Penelitian	Pemanfaatan untuk kebijakan	Keterangan
2016	Program Induksi Guru Pemula (PIGP) Kabupaten Padang Pariaman	Sudah dimanfaatkan	
	Indikator makro Ekonomi Daerah Tahun 2016	Sudah dimanfaatkan	
2017	Pra Feasibility Study Pengembangan Kawasan Pendidikan Tarok	Sudah dimanfaatkan	
	Indikator makro Ekonomi Daerah Tahun 2017	Belum dimanfaatkan	Digunakan untuk bahan penyusunan Perencanaan Daerah/ RKPD Tahun 2019
	Indeks Gini Rasio Tahun 2017	Belum dimanfaatkan	Digunakan untuk bahan penyusunan Perencanaan Daerah/ RKPD Tahun 2019

Capaian indikator kinerja pada sasaran 4 : Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang telah Dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan tahun 2017 dapat dikategorikan **pencapaian sangat baik** dengan tingkat persentase capaian sebesar 120% (60% dari target sebesar 50% yang telah ditetapkan). Berdasarkan perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 untuk indikator indikator Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang telah Dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan diperoleh hasil terjadinya peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar 25%, menjadi 60% pada tahun 2017.

Berhasilnya pencapaian target indikator ini pada tahun 2017 ikut dipengaruhi oleh : Kajian kelitbangan yang dilaksanakan betul-betul sudah merupakan kajian yang dibutuhkan daerah dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait pengembangan pembangunan daerah. Untuk kedepannya diharapkan Lebih meningkatkan kajian-kajian yang dibutuhkan daerah dalam pengembangandan pembangunan daerah lebih lanjut

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini:

1. **Program Penelitian**, dengan kegiatan :

a. Jaringan Penelitian Kabupaten Padang Pariaman

Kegiatan Jaringan Penelitian Kabupaten Padang Pariaman ini mencakup : penyusunan Pra Feasibility Study Pengembangan Kawasan Pendidikan Tarok oleh pihak ketiga.

b. Penyusunan indeks ginie ratio

Kegiatan Penyusunan indeks ginie ratio ini mencakup :

1. Pelaksanaan Kegiatan adalah Tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan 27 November 2017
2. Hasil yang dicapai : Penyusunan Buku Analisis Indek Gini dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 02/NKB-LITBANG-BAPELITBANGDA/V/2017 dan Nomor 064.3/Tahun 2017 Tanggal 02 Mei 2017, dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 02/SPK-LITBANG-BAPELITBANGDA/V-2017 dan Nomor : 064.4/Tahun 2017 Tanggal 26 Mei 2017

3. **Program perencanaan pembangunan ekonomi**, dengan kegiatan :

a. Penyusunan indikator ekonomi daerah

Kegiatan Penyusunan indikator ekonomi daerah ini mencakup :

1. lingkup wilayah Kabupaten Padang Pariaman dengan lingkup pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan Data
 - Data primer yakni data dan informasi yang diperoleh secara langsung dilokasi dengan tujuan untuk melihat kondisi lapangan secara langsung sebagai bahan perbandingan data sekunder



- Data sekunder merupakan data dan informasi yang diperoleh melalui instansi terkait berupa dokumen-dokumen, peta maupun laporan
 - b. Analisis data yang dilakukan pada kelompok data maupun informasi yang berkaitan langsung meliputi PDRB, ADHB, ADHK, ketenagakerjaan, Indeks Dini, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Keuangan Daerah.
2. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen indikator makro ekonomi daerah Kabuapten Padang Pariaman dengan indikator kegiatan adalah bahan masukan dalam menyusun program dan kegiatan di Kabuapten Padang Pariaman

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap kegiatan sesuai APBD Perubahan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Realisasi Keuangan Program/ Kegiatan Bapelitbangda Tahun 2017

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	BELANJA LANGSUNG	4,214,490,250	3,939,478,809	93.47%	275,011,441
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	556,100,000	537,511,993	96.66%	18,588,007
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30,000,000.00	28,878,250.00	96.26%	1,121,750.00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7,000,000.00	6,585,000.00	94.07%	415,000.00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	194,000,000.00	191,880,000.00	98.91%	2,120,000.00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24,000,000.00	19,843,000.00	82.68%	4,157,000.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17,500,000.00	13,857,000.00	79.18%	3,643,000.00
	Penyediaan makanan dan minuman	20,000,000.00	14,317,100.00	71.59%	5,682,900.00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	230,000,000.00	228,751,643.00	99.46%	1,248,357.00
	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	33,600,000.00	33,400,000.00	99.40%	200,000.00

**BAPELITBANGDA KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	407,200,000	389,889,902	95.75%	17,310,098
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	295,000,000.00	290,920,000.00	98.62%	4,080,000.00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11,200,000.00	9,850,000.00	87.95%	1,350,000.00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	81,000,000.00	72,719,902.00	89.78%	8,280,098.00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20,000,000.00	16,400,000.00	82.00%	3,600,000.00
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81,000,000	44,431,500	54.85%	36,568,500
	Pendidikan dan pelatihan formal	36,000,000.00	16,750,000.00	46.53%	19,250,000.00
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45,000,000.00	27,681,500.00	61.51%	17,318,500.00
D.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50,000,000	43,994,900	87.99%	6,005,100
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50,000,000.00	43,994,900.00	87.99%	6,005,100.00
E.	Program pengembangan data/informasi	125,000,000	120,048,850	96.04%	4,951,150
	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	75,000,000.00	72,054,700.00	96.07%	2,945,300.00
	Penyusunan Data Pokok Pembangunan Daerah	50,000,000.00	47,994,150.00	95.99%	2,005,850.00
F.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	85,000,000	78,149,428	91.94%	6,850,572
	Operasional Penunjang Kegiatan KOTAKU Kab. Padang Pariaman	85,000,000.00	78,149,428.00	91.94%	6,850,572.00
G.	Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah & Besar	71,800,000	67,081,630	93.43%	4,718,370
	Perencanaan Air Minum Drainase & Sanitasi Perkotaan	71,800,000.00	67,081,630.00	93.43%	4,718,370.00
H.	Program perencanaan pembangunan daerah	1,304,425,450	1,205,351,492	92.40%	99,073,958
	Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan RPJMD	90,000,000.00	87,221,350.00	96.91%	2,778,650.00
	Revisi RPJMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2016-2021	205,000,000.00	198,994,898.00	97.07%	6,005,102.00
	Penyusunan rancangan RKPD	89,461,300.00	70,501,300.00	78.81%	18,960,000.00

**BAPELITBANGDA KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	188,864,150.00	183,378,650.00	97.10%	5,485,500.00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	120,000,000.00	112,907,784.00	94.09%	7,092,216.00
	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	200,000,000.00	192,778,250.00	96.39%	7,221,750.00
	Penyusunan KUA dan PPAS	200,000,000.00	176,996,000.00	88.50%	23,004,000.00
	Fasilitasi Penyusunan RPJM Nagari	95,000,000.00	92,640,250.00	97.52%	2,359,750.00
	Penyusunan E Planning	116,100,000.00	89,933,010.00	77.46%	26,166,990.00
I	Program perencanaan pembangunan ekonomi	334,124,000	321,440,232	96.20%	12,683,768
	Penyusunan indikator ekonomi daerah	60,000,000.00	56,489,500.00	94.15%	3,510,500.00
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	118,000,000.00	115,217,399.00	97.64%	2,782,601.00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	66,000,000.00	60,179,316.00	91.18%	5,820,684.00
	Pemetaan Ekonomi Daerah	25,124,000.00	25,101,924.00	99.91%	22,076.00
	Fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	65,000,000.00	64,452,093.00	99.16%	547,907.00
J	Program perencanaan sosial dan budaya	355,000,000	336,798,666	94.87%	18,201,334
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	105,000,000.00	100,510,784.00	95.72%	4,489,216.00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	35,000,000.00	31,378,927.00	89.65%	3,621,073.00
	Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat [^])	85,000,000.00	82,974,385.00	97.62%	2,025,615.00
	Pemantauan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Padang Pariaman [^])	50,000,000.00	49,084,970.00	98.17%	915,030.00
	Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahan Sosial di Daerah [^])	80,000,000.00	72,849,600.00	91.06%	7,150,400.00
K	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	134,370,800	131,709,999	98.02%	2,660,801
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30,000,000.00	28,005,700.00	93.35%	1,994,300.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	104,370,800.00	103,704,299.00	99.36%	666,501.00
L	Program Penelitian	164,800,000	161,543,200	98.02%	3,256,800
	Jaringan Penelitian Kabupaten Padang Pariaman	104,800,000.00	103,762,800.00	99.01%	1,037,200.00

**BAPELITBANGDA KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan analisa input output				
	Penyusunan indeks ginie ratio	60,000,000.00	57,780,400.00	96.30%	2,219,600.00
M	Program Perencanaan Tata Ruang	50,000,000	45,611,267	91.22%	4,388,733
	Koordinasi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang	50,000,000.00	45,611,267.00	91.22%	4,388,733.00
N	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	495,670,000	455,915,750	91.98%	39,754,250
	WISM APL II	398,570,000.00	375,259,650.00	94.15%	23,310,350.00
	Paralel Financial WISM	97,100,000.00	80,656,100.00	83.06%	16,443,900.00
	TOTAL	4,214,490,250	3,939,478,809	93.47%	275,011,441



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan yang telah dicapai Bapelitbangda pada tahun 2017 adalah :

1. 2 indikator kinerja utama dengan kategori pencapaian sangat baik yaitu : Persentase keselarasan program prioritas kabupaten dengan Propinsi dan Persentase hasil kajian kelitbangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan
2. 4 indikator kinerja utama dengan kategori pencapaian baik yaitu : Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD, Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKPd, Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang ditampung dalam dokumen perencanaan dan persentase pencapaian IKU pemerintah daerah dengan kategori baik (>90%).

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2017 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2017 ini.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara umum di Bapelitbangda adalah :

1. Upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas proses penyusunan perencanaan daerah yang selaras dan sinkron baik dengandokumen perencanaan daerah, maupun sinkronisasinya dengan propinsi dan nasional
2. Masih adanya ego sektoral antar pemangku kepentingan;
3. Upaya peningkatan tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
4. Base data perencanaan pembangunan yang belum kompherensif dan akurat;
5. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur perencana yang belum memadai sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah.

B. LANGKAH KE DEPAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana sehingga mampu membuat dan menyusun dokumen perencana daerah dan OPD dengan baik



2. Meningkatkan koordinasi terkait bidang pembangunan daerah dengan pemangku kepentingan secara keseluruhan;
3. Meningkatkan koordinasi eksekutif dan legislatif terkait komitmen peningkatan aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
4. Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi;
5. Penerapan E-planning dalam penyusunan perencanaan tahunan daerah dan perangkat daerah

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah mengharapkan Laporan Kinerja ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah maupun, masyarakat dan stakeholders yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2017 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2017. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Parit Malintang, Maret 2018
**KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Ir. H. ALI AMRAN, MP

Pembina Utama Muda, NIP. 19620619 199103 1 007